



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENGUATAN KEBUDAYAAN SEBAGAI BASIS PEMBANGUNAN NASIONAL DI INDONESIA

Shanti Dwi Kartika
Analisis Legislatif Ahli Madya
shanti.kartika@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kebudayaan dan pembangunan adalah dua hal yang saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain. Indonesia sebagai negara multikultural memiliki kebudayaan yang beragam dan berlimpah, sehingga dapat menjadi modal dasar, aset penting, dan daya utama untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kebudayaan memiliki nilai positif yang mencerminkan peradaban, identitas, potensi, tradisi, pengetahuan, kearifan, dan kreativitas bangsa yang kaya dan hidup, sekaligus memiliki peran strategis dalam memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan kemanusiaan. Kebudayaan juga memiliki beberapa peran dan fungsi dalam pembangunan nasional, seperti daya tarik bangsa asing, pengembangan kebudayaan nasional, penumbuhan sikap toleransi, pelestarian warisan budaya, serta inspirasi dan inovasi bagi pembangunan yang kreatif dan dinamis.

Untuk mendukung hal tersebut, negara telah berupaya dalam memajukan kebudayaan nasional dan memberikan kebebasan masyarakat untuk berbudaya di tengah peradaban dunia, sesuai dengan amanat Pasal 32 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Negara juga melaksanakan pemajuan kebudayaan melalui UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Undang-undang ini juga menetapkan bahwa kebudayaan harus menjadi haluan pembangunan nasional. Selain itu, negara juga harus mengikuti rekomendasi Kongres Kebudayaan Indonesia 2023, yaitu pada periode 2024–2029, negara harus meletakkan pemajuan kebudayaan sebagai dasar publik dan panduan transformasi ekonomi, sosial, dan ekologi untuk mencapai Visi Indonesia 2045. Kongres ini juga merekomendasikan terbentuknya kawasan pemajuan kebudayaan sebagai model perencanaan pembangunan yang berorientasi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan di Indonesia, yang meliputi mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri, persatuan, dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan memengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, negara masih perlu melakukan beberapa hal. *Pertama*, perlu menguatkan kebudayaan sebagai basis pembangunan nasional, dengan meningkatkan anggaran, perhatian, dan dukungan terhadap kebudayaan, pelestarian warisan budaya, serta seniman dan budayawan. *Kedua*, membuat kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia, dengan mengintegrasikan sudut pandang, paradigma, dan pengetahuan berbasis kekayaan budaya Indonesia. Hal ini dapat membantu Indonesia memanfaatkan potensi dan kemampuan kebudayaannya yang dapat menginspirasi dan menginovasi bagi pembangunan yang kreatif dan dinamis. *Ketiga*, menjadikan kebudayaan sebagai sarana dan alat untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, toleransi, dan pluralisme; mempererat persatuan dan kesatuan bangsa; dan menjaga kedaulatan dan integritas nasional. Keempat, menjadikan kebudayaan sebagai media untuk berdialog dan berkontribusi dengan kebudayaan dunia, serta menjadi kekuatan *soft power* bagi Indonesia di kancah internasional. *Kelima*, menjadikan

kebudayaan sebagai wahana dan jalan untuk mengekspresikan diri, mengembangkan potensi, mewujudkan cita-cita bangsa, dan mencapai kebahagiaan, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, kebudayaan menghadapi berbagai tantangan dan ancaman akibat globalisasi, modernisasi, urbanisasi, perubahan zaman dan sosial yang cepat, dan kurangnya pendidikan budaya. Hal ini bisa mengancam budaya tradisional dan hilangnya bahasa lokal. Beberapa tantangan harus diatasi agar kebudayaan dapat terintegrasi dalam menggabungkan kebudayaan ke dalam pembangunan, antara lain, kurangnya: (1) pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap kebudayaan sebagai basis pembangunan; (2) integrasi dan sinergi antara kebijakan/program pembangunan dengan kebijakan/program kebudayaan; (3) perlindungan dan pengembangan terhadap keragaman budaya Indonesia; serta (4) pemanfaatan dan pembinaan terhadap kebudayaan sebagai sumber inovasi dan kreativitas. Beberapa hal tersebut mengakibatkan kebudayaan sering tidak dihargai, tidak sejalan dengan kebijakan/program pembangunan, timpang dalam alokasi sumber daya dan potensi kebudayaan, terjadi degradasi, tidak berkembang, dan tergantung terhadap budaya asing.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI berperan penting dalam melaksanakan fungsi pengawasan untuk pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta fungsi legislasi untuk mengusulkan revisi atau perubahan undang-undang jika diperlukan. Komisi X DPR RI perlu melakukan penguatan kebudayaan sebagai basis pembangunan nasional dengan cara: (1) meningkatkan anggaran untuk alokasi pemajuan kebudayaan; mendorong pemerintah untuk meningkatkan anggaran, perhatian, dan dukungan terhadap kebudayaan, pelestarian warisan budaya, serta seniman dan budayawan; (2) mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan rekomendasi Kongres Kebudayaan Indonesia 2023; (3) mendorong dan mendukung terbentuknya kawasan pemajuan kebudayaan di berbagai daerah dan mengawasi pelaksanaannya; (4) mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan pembangunan sesuai kebudayaan bangsa Indonesia melalui pengintegrasian keduanya; dan (5) mendorong dan mendukung peningkatan kerja sama dan kontribusi kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan dunia, serta mengawasinya.

Sumber

beritamagelang; 3 November 2023;
brief.id, 4 November 2023;
goodnewsfromindonesia.id, 3 November 2023;
kebudayaan.kemdikbud.go.id, 13 September 2018;
Kompas, 30 Oktober 2023;
kompas.id, 29 dan 30 Oktober 2023;

ksi-indonesia.org, 5 Mei 2017;
kumparan.com, 2 November 2023;
Media Indonesia, 30 Oktober 2023;
neraca.com, 30 Oktober 2023; dan
tempo.co, 29 Oktober 2023.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



[@anlegbkdoofficial](#)



Polhukam

Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang

Mandala Harefa
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Monika Suhayati

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

EDITOR

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023